

**PENGARUH KEAHLIAN, INDEPENDENSI, ETIKA
TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROPINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

FERIA ESTIKAWATI



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PENGARUH KEAHLIAN, INDEPENDENSI, ETIKA TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROPINSI LAMPUNG

Oleh

FERIA ESTIKAWATI

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh keahlian, independensi, etika terhadap kualitas audit. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data diambil menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada responden. Penelitian ini ada empat variabel yang terdiri dari tiga variabel independen, yaitu keahlian, independensi, etika dan satu variabel dependen yaitu kualitas audit. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Keahlian, independensi dan etika berpengaruh positif dan signifikan dan simultan terhadap kualitas audit. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa keahlian, independensi, etika untuk meningkatkan kualitas audit dari auditor pemerintah yang bekerja di BPK Perwakilan Propinsi Lampung sudah baik sehingga mampu memberikan jasa pelayanan baik yang diharapkan masyarakat tetapi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit yang lebih baik lagi, maka diperlukan adanya peningkatan keahlian yaitu pengetahuan, independensi dan etika dengan menjunjung tinggi prinsip kode etik profesi dalam setiap penugasan audit yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan hasil audit yang lebih baik lagi.

Kata kunci : keahlian, independensi, etika dan kualitas audit.

ABSTRACT

The Effect of Expertise, Independence, Ethics To The Quality Audit At the Representative Audit Agency of the Republic Indonesian Province Lampung

BY

FERIA ESTIKAWATI

The objective of this research is to empirically the effect of expertise, independence, ethics for quality audit. This research was conducted at the of Representative Audit Agency of the Republic of Indonesian Province Lampung. Sampling technique used is purposive sampling.

This study was a quantitative research. The sources of data in this study are primary data. The data taken using questionnaires distributed to respondents. In this research there are four variables, consist of three independent variables, namely expertise, independence, ethics and one dependent variable namely audit quality. The data analysis method used is a multiple linear regression analysis.

The results showed that the expertise has a positive impact and significant to the audit quality, Independence has a positive impact and significant to the audit quality, Ethics has a positive impact and significant to the audit quality, expertise, independence, ethics has a positive significant and simultaneous to the audit quality. This implication research expertis, independence and ethics to improve the quality audits of the government auditors who work in representative audit agency Province Lampung has been better able to provide services both expected by society but in order to improve audit quality better yet, it is necessary to increase skills such as knowledge , independence and ethics to uphold the principles of the code ethics of the profession in each audit assignment that is ultimately expected to improve the performance and results of the audit better .

Keywords : Expertise, Independence, Ethics and Quality Audit.

**PENGARUH KEAHLIAN, INDEPENDENSI, ETIKA TERHADAP KUALITAS AUDIT
PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROPINSI LAMPUNG**

Oleh

FERIA ESTIKAWATI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

MAGISTER ILMU AKUNTANSI

Pada

**Program Pascasarjana Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : **PENGARUH KEAHLIAN, INDEPENDENSI, ETIKA TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROPINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Feria Estikawati**

No. Pokok Mahasiswa : 1421031023

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19700801 199512 2 001

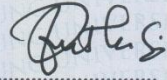
Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt.
NIP 19830830 200604 2 001

2. Ketua Program Magister Ilmu Akuntansi

Susi Sarumpaet, S.E., MBA., Ph.D., Akt.
NIP 19691008 199512 2 001

MENGESAHKAN

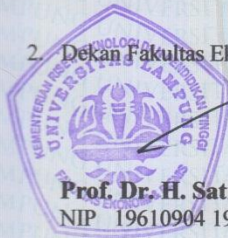
1. Tim Penguji :

Ketua : Dr. Agianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. 

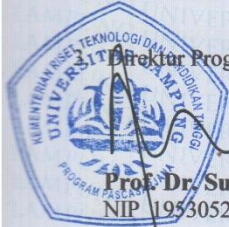
Sekretaris : Yenni Agustina, S.E., M.Sc., Akt. 

Penguji Utama : Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt. 

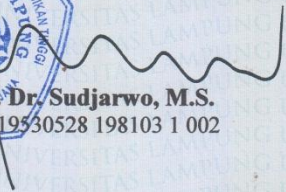
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP 19610904 198703 1 011



3. Direktur Program Pascasarjana


Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : 19 Juli 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**Pengaruh Keahlian, Independensi, Etika terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Propinsi Lampung**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran maka saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan dan bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 19 Juli 2016
Pembuat Pernyataan,



Feria Estikawati
NPM 1421031023

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 23 Februari 1979, sebagai putri ke tiga dari empat bersaudara dari Pasangan Bapak Sutimo, dan Ibu Dalinem.

Riwayat pendidikan dimulai dengan Pendidikan TK. LKMD yang diselesaikan tahun 1986, menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD), di SD Negeri 1 Hadimulyo Timur Metro Tahun 1991, SMP Muhammadiyah 3 Metro Tahun 1994, dan SMU Teladan I Metro Tahun 1997. penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Manajemen Sumber Daya Manusia pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIE) Bandung pada tahun 2004.

Pada Tahun 2014 Penulis melanjutkan pendidikan program Pascasarjana Ilmu Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, Ia mendapatkan pahala (dari kebajikan) yang diusahakan dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Al-Baqoroh:286)

*Orang-orang yang berilmu itu akan dimuliakan sebanding dengan orang-orang yang memiliki akal yang sempurna.
Ketahuilah! Ilmu seorang itu akan bermanfaat baginya
(Mulhaq Bi Jam'i Mudzakkar As-Salim)*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN RIWAYAT HIDUP	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.2 BPK- RI.....	11
2.2.1. Fungsi BPK-RI	11
2.2.2. Tugas dan Wewenang BPK-RI.....	12
2.2.2.1. Tugas BPK-RI.....	12
2.2.2.2 Wewenang BPK-RI	13
2.2.3 Jenis-jenis Audit BPK.....	14
2.2.4 Standar Audit BPK	15
2.2.5. Jenis Opini BPK.....	17
2.2.6 Audit	18
2.2.6.1 Jenis-jenis Audit.....	20
2.2.7 Kualitas Audit	24
2.2.8 Keahlian	25
2.2.9 Independensi.....	26
2.2.10 Etika.....	29
2.2.11 Penelitian Sebelumnya.....	32
2.3. Pengembangan Hipotesis	34
2.3.1 Pengaruh Keahlian Terhadap Kualitas Audit.....	34

2.3.2	Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit.....	35
2.3.3	Pengaruh Etika Terhadap kualitas Audit.....	37
2.3.4	Pengaruh Keahlian, Independensi, Etika Terhadap Kualitas. Audit.....	39
2.4.	Kerangka Pemikiran.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Desain Penelitian.....	41
3.2	Populasi dan Sampel	41
3.3	Metode Pengumpulan Data	43
3.4.	Definisi Operasional	43
3.5.	Model dan Teknik Analisis Data.....	46
3.5.1	Model Analisis Data	46
3.5.2	Teknik Analisis Data.....	46
3.5.3	Uji Kualitas Data.....	46
3.5.3.1.	Uji Validitas	47
3.5.1.2	Uji Reliabilitas	47
3.5.4	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.5.4.1	Uji Multikolinearitas	48
3.5.4.2	Uji Heteroskedastisitas.....	48
3.5.4.3	Uji Normalitas Data	49
3.5.5	Statistik Deskriptif	49
3.5.6	Pengujian Hipotesis	49

3.5.6.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	50
3.5.6.2 Uji Statistik F (F-test).....	50
3.5.6.3 Uji Statistik t (t-test).....	51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data dan Responden.....	52
4.2 Karakteristik Responden.....	53
4.3 Hasil Analisis Data.....	54
4.3.1 Uji Kualitas Data.....	54
4.3.2 Hasil Uji Validitas.....	54
4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas.....	56
4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	56
4.3.3.1 Hasil Uji Normalitas.....	57
4.3.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	58
4.3.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	59
4.4.3 Analisis Deskriptif	60
4.5 Pengujian Hipotesis.....	61
4.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi (R^2).....	61
4.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis Uji F.....	62
4.5.3 Hasil Pengujian Hipotesis Uji t	63
4.6 Hasil Persamaan Regresi.....	65
4.6.1 Keahlian Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit.....	66
4.6.2 Independensi Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit.....	67
4.6.3 Etika Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit.....	69

4.6.4 Keahlian, Independensi, Etika Berpengaruh terhadap Kualitas Audit	72
--	----

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	74
5.2 Implikasi	76
5.3 Keterbatasan	77
5.4. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Penelitian sebelumnya.....	32
3.1. Definisi operasional variabel.....	45
4.1. Penyebaran dan Pengembalian Responden.....	53
4.2 Demografi Responden.....	54
4.3 Validitas	56
4.4 Realibilitas.....	57
4.5 Uji Multikolinieritas.....	60
4.6 Tabel analisis Deskriptif.....	61
4.7 Uji R.....	63
4.8 Uji F.....	63
4.9 Uji t	65
4.10 Hasil persamaan regresi.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Histrogram Dependensi.....	58
2.2. Normal P-P Plot.....	59
2.3. Scatterplot.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Sunarsip, 2001).

Menurut Mardiasmo (2005) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga independen yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara yang diamanatkan dalam UU No. 15 tahun 2004 untuk melakukan audit. Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan

tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil audit memberikan informasi mengenai potensi kerugian negara yang ditemukan dalam audit akibat dari penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD. Beberapa hasil audit BPK-RI ditindaklanjuti menjadi audit investigasi, kasus korupsi dan kasus pidana. Meskipun audit telah dilaksanakan, masih terdapat permasalahan pengelolaan keuangan negara di Pemerintahan. Berdasarkan audit pada semester I tahun 2015 terhadap entitas di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara, BPK mengungkapkan 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan, yang meliputi 7.544 (48,88%) permasalahan kelemahan SPI dan 7.890 (51,12%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan itu, sebanyak 4.609 (58,42%) merupakan permasalahan berdampak finansial senilai Rp 21,62 triliun. Selain itu, terdapat 3.281 (41,58%) permasalahan ketidakpatuhan yang tidak berdampak finansial, terdiri atas 3.137 (95,61%) penyimpangan administrasi dan 144 (4,39%) ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp 11,84 triliun. (*Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2015*).

Didaerah seperti di Lampung masih juga terjadi kasus korupsi salah satunya pada tahun 2010 kasus korupsi APBD Pemkab yang merugikan keuangan daerah senilai Rp 28 miliar. Di Bandar Lampung kasus dana bantuan sosial (bansos) yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 1,3 miliar, di Kabupaten Pringsewu

Pembangunan GOR yang merugikan keuangan daerah senilai Rp 1,2 miliar.

(Sumber : *Sentral Korupsi dan data untuk Anti Korupsi (SIDAK) InfoKorupsi.com.*)

Kasus tersebut terlihat lemahnya pengendalian internal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/Pusat sehingga ada sebagian oknum di lingkungan Pemerintahan Daerah/Pusat yang tidak atau belum siap dengan berlakunya otonomi daerah, terutama berkaitan dengan masalah etika dan moral dari oknum pejabat Pemerintahan Daerah/Pusat yang rendah. Masih banyak permasalahan pengelolaan keuangan negara untuk mendorong perlunya audit yang berkualitas guna memperbaiki permasalahan tersebut. Audit yang berkualitas dilakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada BPK atas perannya dalam melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

De Angelo (1981) mendefinisikan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas hasil pemeriksaan juga berarti pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kualitas audit sangat dipengaruhi oleh kompetensi auditor nya menurut Teori sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh Triandis (1971) menyatakan, bahwa perilaku ditentukan oleh sikap, aturan-aturan sosial dan kebiasaan. Teori sikap dan perilaku

dapat mempengaruhi seorang tersebut untuk bertindak, jujur, adil, tegas tanpa dipengaruhi tekanan maupun permintaan dari pihak tertentu atau kepentingan pribadi yang nantinya akan perilaku auditor dapat mempengaruhi keahlian, independensi dan etika auditor dalam mengambil judgment yang lebih berkualitas.

Peraturan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Pernyataan standar umum pertama adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Auditor BPK harus mempunyai keahlian untuk memahami dan melaksanakan jasa profesionalnya, pendidikan berkelanjutan, wajib mengikuti pelatihan/bimbingan teknis untuk menunjang auditnya, memiliki sertifikasi keahlian yang diterima umum dan mampu berkomunikasi secara efektif dengan auditan. Pernyataan standar umum kedua menyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, Auditor BPK harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Bersikap independen berarti menghindarkan hubungan yang dapat mengganggu sikap mental dan penampilan obyektif auditor dalam melaksanakan audit yang berkualitas. Dalam hal ini agar pelaksanaan audit berkualitas, siapapun yang melaksanakannya diharapkan dapat menghasilkan suatu mutu audit yang sama ketika auditor melaksanakan audit sesuai dengan kode etik dan standar audit yang bersangkutan.

Auditor BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh

setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya seperti norma sikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik terhadap organisasi interen, auditan, masyarakat dan perundang - undangan yang berlaku. Etika secara umum didefinisikan sebagai perangkat prinsip moral atau nilai.

Etika bertujuan membantu manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keahlian, independensi, dan etika merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan kualitas audit dalam rangka mewujudkan sistem pengawasan yang baik sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang.

Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan alat statistik SPSS dan kontribusi yang dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi auditor BPK, semakin auditor memiliki keahlian, independensi, etika yang baik dalam melaksanakan tugasnya maka kualitas audit diharapkan menjadi semakin lebih baik lagi.

Penelitian Fransisika (2014) dan Wiwit dkk (2010) menyatakan bahwa kompetensi tidak mempengaruhi kualitas suatu audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alim dkk (2007); Efendy (2010); Novie (2013) menyatakan bahwa keahlian mempengaruhi kualitas suatu audit. Sebaliknya independensi akan mempengaruhi kualitas audit (Indah,2010). Pernyataan di atas di dukung dengan hasil penelitian oleh Alim dkk (2007); Novie (2013); Dewi dkk (2013) tetapi sebaliknya Samuelson et al (2006); Efendy (2010); Wiwit (2010) menemukan bahwa independensi tidak mempengaruhi kualitas audit. Hasil penelitian bahwa variabel etika berpengaruh

signifikan terhadap kualitas audit. Dewi (2013); Novie (2013) Fransiska (2014) namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwit (2010); Kitta (2009); Alim (2007) Etika tidak berpengaruh terhadap Kualitas audit.

Berdasarkan gambaran di atas masih terdapat beberapa perbedaan antara penelitian sebelumnya yaitu tempat penyebaran responden Inspektorat. Penelitian ini menjadi penting karena kualitas audit saat ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena hasil audit digunakan oleh banyak pihak dan digunakan untuk mengambil suatu keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merencanakan mengadakan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Audit pada BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung”**

1.2. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah memperoleh bukti empiris untuk:

1. Apakah keahlian berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK- RI Perwakilan Provinsi Lampung?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK- RI Perwakilan Provinsi Lampung?
3. Apakah etika berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK- RI Perwakilan Provinsi Lampung?

4. Apakah keahlian, independensi dan etika berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK- RI Perwakilan Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh keahlian, independensi dan etika terhadap kualitas audit pada BPK- RI Perwakilan Provinsi Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi praktisi untuk meningkatkan kualitas audit pada lembaga audit dengan memberikan masukan dan saran terkait dengan keahlian, independensi dan etika dapat meningkatkan kualitas audit yang lebih baik lagi.
2. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik. Dan diharapkan dapat menambah referensi penelitian-penelitian akuntansi sektor publik selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Sikap dan Perilaku

Teori sikap dan perilaku yang di kembangkan oleh Triandis (1971) dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan keahlian, independensi, etika dan kualitas audit . Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan oleh sikap, aturan-aturan sosial dan kebiasaan. Sikap terdiri dari komponen kognitif yaitu keyakinan, komponen afektif yaitu suka atau tidak suka, berkaitan dengan apa yang dirasakan dan komponen perilaku yaitu bagaimana seorang ingin berperilaku terhadap sikap.

Menurut Robbins (2003) sikap adalah pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang obyek, orang, atau peristiwa.

Sedangkan menurut Khikmah (2005) sikap adalah memberikan pemahaman tentang tendensi atau kecenderungan untuk bereaksi. Pembentukan atau perubahan sikap ditentukan oleh dua faktor pokok, yaitu faktor individu (faktor dalam) dan faktor luar. Faktor individu adalah faktor yang berhubungan dengan respon individu menanggapi dunia luar secara selektif. Sedangkan faktor luar adalah faktor yang berhubungan

dengan hal-hal atau keadaan dari luar yang merupakan rangsangan atau stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap (Maryani dan Ludigdo, 2001).

Sikap memiliki fungsi: pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensi ego dan ungkapan nilai. Pemahaman berfungsi membantu seseorang dalam memberikan maksud atau memahami situasi atau peristiwa baru. Sikap juga melayani suatu hal yang bermanfaat atau sebagai fungsi kebutuhan yang memuaskan. Sikap juga melayani fungsi defensif ego dengan melakukan pengembangan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri atau dunianya, dan akhirnya sikap juga melayani fungsi nilai ekspresi untuk mencapai kepuasan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sikap adalah pengetahuan, perasaan-perasaan, dan kecenderungan untuk bertindak sehingga berfungsi mengarahkan dan memberikan pedoman bagi perilaku seseorang terhadap masalah atau keadaan yang akan dihadapi

Menurut Notoatmojo (2007) Perilaku merupakan totalitas penghayatan dan aktivitas, yang merupakan hasil akhir jalinan yang saling mempengaruhi antara berbagai macam gejala seperti perhatian, pengamatan, pikiran, ingatan, dan fantasi gejala itu muncul bersama-sama dan saling mempengaruhi faktor. Sedangkan menurut Maryani dan Ludigdo, (2001) bahwa perilaku merupakan perwujudan atau manifestasi karakteristik-karakteristik seseorang dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan dan Skinner (dalam Notoatmodjo, 2005), menyatakan bahwa perilaku adalah respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar). Oleh karena itu perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner disebut teori "S-O-R" atau Stimulus-Organism-

Response. Berdasarkan teori S-O- R ini perilaku manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Perilaku tertutup adalah perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih terbatas dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang bersangkutan. Bentuk *covert behaviour* yang diukur adalah pengetahuan dan sikap.
2. Perilaku terbuka adalah perilaku terbuka ini terjadi bila respon terhadap stimulus sudah berupa tindakan atau praktek yang dapat diamati orang dari luar. Perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku seseorang ditentukan oleh banyak faktor. Adakalanya perilaku seseorang dipengaruhi oleh kemampuannya, adapula karena kebutuhannya dan ada juga yang dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya (Thoha, 2005). Perilaku merupakan respon seseorang terhadap stimulus yang berasal dari dalam maupun luar dirinya.

Sikap dan perilaku yang netral, independen dan tidak memihak serta menghindari kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit serta wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit dengan adanya auditor yang independen dan etikanya/moralnya baik diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat. Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang berguna dalam mengambil keputusan rasional dan berkualitas.

Teori sikap dan perilaku dapat mempengaruhi auditor untuk bertindak, jujur, adil, tegas tanpa dipengaruhi tekanan maupun permintaan dari pihak tertentu atau kepentingan pribadi yang nantinya akan mempengaruhi auditor dalam mengambil judgment yang berkualitas. Keahlian seseorang auditor yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi, etika dan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai auditor yang independen dan berkualitas. Teori sikap dan perilaku dapat menjelaskan independensi auditor dalam penampilan. Seorang auditor yang memiliki sikap independen akan berperilaku independen artinya seorang auditor dalam menjalankan tugasnya tidak dibenarkan memihak terhadap kepentingan siapapun.

2.2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dibentuk berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang menyatakan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Sesuai dengan semangat reformasi, amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 menambah satu bab tambahan tentang BPK-RI,

2.2.1. Fungsi BPK-RI

Dalam melaksanakan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, BPK-RI mempunyai 3 (tiga) fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pemeriksaan, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, untuk menilai tentang: Ketepatan operasi keuangan, kelayakan laporan keuangan, ketertiban administrasi dan ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, penggunaan uang belanja apakah telah dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Fungsi Rekomendasi, yaitu memberikan pertimbangan serta saran kepada pemerintah berkaitan dengan segala hal yang bersifat penyempurnaan mendasar, strategis dan berskala nasional di bidang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
3. Fungsi Quasi Yudisial, yaitu melakukan proses Tuntutan Perbendaharaan (TP) yang ditujukan terhadap bendaharawan yang merugikan negara dan memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan yang merugikan Negara.

2.2.2. Tugas dan Wewenang BPK-RI

2.2.2.1. Tugas BPK-RI

Tugas BPK-RI adalah melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK-RI meliputi seluruh unsur keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu:

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara

- d. Pengeluaran Negara
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah
- g. Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

2.2.2. 2 Wewenang BPK-RI.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya BPK-RI berwenang:

- a. Menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan Pemeriksaan
- b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan, melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan pembukuan dan tata usaha keuangan Negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Negara.

- c. Menetapkan jenis dokumen, data serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang wajib disampaikan kepada BPK-RI
- d. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan Negara setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara
- e. Menetapkan Kode Etik Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- f. Membina Jabatan Fungsional pemeriksa
- g. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan
- h. Memberi pertimbangan atas Rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

2.2.3. Jenis-jenis Audit BPK

sesuai dengan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara pemeriksaan yang dilakukan BPK-RI yaitu :

1. Audit keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah,
2. Audit kinerja yaitu audit atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Tujuan pemeriksaan kinerja adalah untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan dan untuk pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang

dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif,

3. Audit tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

2.2.4. Standar Audit BPK

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SPKN yang dibagi dalam Standar Umum, Standar Pelaksanaan, dan Standar Pelaporan.

1. Standar Umum

- a. Pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.
- b. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.
- c. Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib cermat dan seksama.
- d. Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak yang kompeten.

2. Standar Pelaksanaan

- a. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit cukup dan kompeten melalui inpeksi, pengamatan, pengujian pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar pelaporan

- a. Laporan audit menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penusunan laporan keuangan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatife dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pertanyaan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

2.2.5. Jenis Opini BPK

1. Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2. WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP).

Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkan paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain

3. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Opini Wajar dengan pengecualian (biasa disingkat WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan *little adverse* (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam item

tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

4. Tidak wajar (*adversed opinion*)

Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

5. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian auditor dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

2.2.6. Audit

Mulyadi (2002) audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat penyesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria kepentingan.

Menurut Hebert (2005) pengertian auditing adalah : “suatu proses kegiatan selain bertujuan untuk mendeteksi kecurangan atau penyelewengan dan memberikan simpulan atas kewajaran penyajian akuntabilitas, juga menjamin ketaatan terhadap hukum, kebijaksanaan dan peraturan melalui pengujian apakah aktivitas organisasi dan program dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.”

Pengertian Audit menurut Simamora (2002) adalah “Suatu proses sistematis pencarian dan pengevaluasian secara obyektif bukti mengenai asersi tentang peristiwa dan tindakan ekonomis untuk meningkatkan kadar kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Jadi dapat disimpulkan auditing adalah penyajian bukti-bukti laporan secara akurat dalam pernyataan dalam laporan informasi yang dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan yang bertujuan tidak terjadinya kecurangan serta hal-hal dibatas kewajaran dalam mengaudit.

Dari definisi di atas dapat diketahui unsur-unsur penting dalam audit yaitu audit merupakan suatu proses sistematis yang bersifat logis, terstruktur, dan terorganisir. Proses sistematis yang dilakukan tersebut merupakan proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh individu maupun entitas yang kemudian dievaluasi oleh auditor.

Bastian (2007) audit sektor publik adalah jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka dani.

Dapat disimpulkan bahwa audit sektor publik adalah audit yang dilakukan terhadap pemerintah seluruh sumber pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat. Audit sektor publik ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran pelaporan yang dibuat dengan kondisi real yang terjadi apakah instansi pemerintah telah melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

2.2.6.1. Jenis - Jenis Audit

Menurut Gondodiyoto (2007) mengemukakan jenis-jenis audit sebagai berikut:

1. Audit keuangan (*general financial audit*)
 - a. Memeriksa ada atau tidaknya salah saji materialitas terhadap seluruh informasi keuangan perusahaan (*financial statements*).
 - b. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Keuangan.
 - c. Laporan audit bentuk baku dan dengan opini Akuntan/Auditor.
 - d. Pemakai laporan dari pihak ekstern & intern.
 - e. Periode audit segera setelah tahun buku berakhir, frekuensi 1x/tahun.
 - f. Untuk perusahaan PT Tbk. (*go public*) ditentukan oleh peraturan
 - g. Data aktual lazimnya historis (ada juga yang prospektif).
 - h. Lazimnya dilakukan oleh akuntan/auditor eksternal independen
2. Audit keuangan khusus (*special audit*)
 - a. Audit dilakukan secara lebih mendalam, bukan hanya audit terhadap laporan keuangan (*general financial audit*).
 - b. Bersifat mendalam (*special assignment*, misalnya pemeriksaan tuntas, *due diligent*), atau yang bersifat investigasi (*investigative audit*).

3. Audit ketaatan (*compliance audit*)

- a. Audit atas kepatuhan terhadap peraturan, penelitian upah untuk menentukan kesesuaiannya dengan peraturan upah minimum, memeriksa surat perjanjian kredit bank dengan nasabahnya dan sebagainya.
- b. Dilakukan oleh orang kompeten/ independen.
- c. Penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan dengan kriteria yang ditetapkan.
- d. Kesimpulan/temuan, rekomendasi/usul/saran perbaikan.

4. Audit operasional (*operational/management audit*).

- a. Dilakukan oleh orang kompeten/indepen denterhadapperasionalisasi entitas/ segmen/ divisi tertentu.
- b. Efektif/ efisien/ ekonomis tidaknya suatu operasionalisasi entitas.
- c. Lebih berorientasi pemeriksaan kinerja.
- d. Laporan pemeriksaan tidak baku.
- e. Laporan dipakai pihak intern saja, khususnya atasan langsung.
- f. Pelaksanaan & frekuensi tergantung kebutuhan/ kemauan pimpinan organisasi.
- g. Data potensial atau kecenderungan kedepan yang mungkin terjadi
- h. Laporan audit bersifat kesimpulan/temuan dan rekomendasi/ usul/ saran perbaikan.

5. Audit sistem informasi

- a. Pemeriksaan atau audit yang dilaksanakan dalam rangka IT Governance (sebenarnya merupakan audit operasional secara khusus terhadap pengelolaan sumber daya informasi).

- b. Berbeda dengan general audit yang bersifat memberikan keyakinan kepada top management apakah pengelolaan sistem informasi di perusahaannya sudah on the right track
 - c. Karena yang diaudit ialah tata kelola TI (IT Governance), maka yang diperiksa antara lain adalah teknologi informasi itu sendiri.
6. Investigative audit
- a. Gabungan dari compliance & operational audit.
 - b. Dilakukan orang kompeten/independen.
 - c. Kriteria ditetapkan lebih dahulu dan jelas.
 - d. Bukti yang diperlukan cukup.
 - e. Informasi yang relevan dapat diperoleh.
 - f. Evaluasi atas kesesuaian antara bukti/ informasi dengan kriteria.
 - g. Evaluasi terhadap efisiensi & efektivitas.
 - h. Kesimpulan/ rekomendasi perbaikan terhadap kesesuaian (compliance) dan efisiensi serta efektivitas.
7. Audit forensik (forensic audit).
- a. Dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan dalam opini sebagai saksi ahli dalam proses legal.
 - b. Jenis-jenis penugasannya antara lain: Investigasi kriminal, bantuan dalam konteks perselisihan para pemegang saham, masalah gangguan usaha (business interruption)/ jenis lain dari klaim asuransi, bussiness/ employee fraud investigation.
8. Audit terhadap kecurangan (fraud audit)
- a. Merupakan proses audit yang memfokuskan pada keanehan/ keganjilan obyek yang perlu dilakukan audit.

- b. Mencegah terjadinya kecurangan (*preventing fraud*) mendeteksi (*detecting*) maupun pemeriksaan kecurangan (*investigating fraud*).

9. Audit e-commerce/ webtrust

Audit terhadap e -commerce bersifat audit TI “front-office system”.

Jenis – jenis audit menurut Mulyadi (2002) adalah sebagai berikut:

- Audit laporan keuangan (*financial statement audit*). Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor eksternal terhadap laporan keuangan kliennya untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan tersebut disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Hasil audit lalu dibagikan kepada pihak luar perusahaan seperti kreditor, pemegang saham, dan kantor pelayanan pajak.
- Audit kepatuhan (*compliance audit*). Audit ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu . Kriteria- kriteria yang ditetapkan dalam audit kepatuhan berasal dari sumber-sumber yang berbeda. Contohnya ia mungkin bersumber dari manajemen dalam bentuk prosedur-prosedur pengendalian internal. Audit kepatuhan biasanya disebut fungsi audit internal, karena oleh pegawai perusahaan.
- Audit operasional (*operational audit*) Audit operasional merupakan penelaahan secara sistematis aktivitas operasi organisasi dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Dalam audit operasional, auditor diharapkan melakukan pengamatan yang obyektif dan analisis yang komprehensif terhadap operasional-operasional tertentu.

2.2.7. Kualitas Audit

Auditor Pemerintahan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

De Angelo (1981) mendefinisikan bahwa kualitas audit merupakan probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kualitas hasil pemeriksaan juga berarti pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Kualitas audit menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Dalam lampiran 3 SPKN disebutkan bahwa:

“Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau

status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan” (paragraf 17).

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh auditee. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit antara lain kualitas proses, apakah audit dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur dan tindak lanjut hasil audit.

2.2.8. Keahlian

Menurut Lastanti (2005) “keahlian atau kompetensi adalah sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit”. Sehingga dapat diartikan bahwa kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Keahlian adalah seorang auditor yang berkompentensi adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas dan ditunjukkan dalam pengalaman auditnya. (Efendy, 2010).

Lee dan Stone (1995), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.

Keahlian menurut SPKN standar umum yang pertama adalah Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan” yaitu persyaratan pendidikan berkelanjutan, persyaratan kemampuan/keahlian pemeriksa, keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif, hadal, cermat dan seksama.

2.2.9. Independensi,

Menurut Messier et al (2005), independensi merupakan suatu istilah yang sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan yang mungkin mengganggu obyektivitas auditor.

Menurut Mulyadi (2002), auditor mengatur sikap mental independen dalam menjalankan tugasnya. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi auditor dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.

Sedangkan menurut Harahap (1991), independensi adalah auditor harus bebas dari kepentingan terhadap perusahaan dan laporan keuangan yang dibuatnya.

Pernyataan standar umum kedua SPKN independensi adalah: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”.

Auditor harus menghindari dari situasi yang menyebabkan gangguan pribadi dan gangguan eksterns misalnya auditor memiliki hubungan yang dekat dengan auditan seperti hubungan sosial keluarga atau hubungan lainnya hal ini dapat merusak independensi seorang auditor dalam memberikan penilaian tidak obyektif hal tersebut dapat menyebabkan auditnya tidak berkualitas karena mempunyai kepentingan.

Seorang auditor harus independen karena diharapkan dalam mengaudit tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat. Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang berguna dalam mengambil keputusan rasional dan berkualitas.

Arens dan Loebbecke (1996) mendefinisikan “independensi sebagai berikut, auditing berarti berpegang pada pandangan yang tidak memihak di dalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit”. Sikap tidak memihak ini dapat dibentuk dalam dua sudut pandang yaitu :

1. Independensi dalam kenyataan (*Independence in fact*) yang berarti akuntan dapat menjaga sikap yang tidak memihak dalam melaksanakan pemeriksaan.
2. Independensi dalam penampilan (*Independence in appearance*) yang berarti akuntan bersikap tidak memihak menurut persepsi pemakai laporan keuangan.

Antara independensi dalam sikap mental dan independensi dalam penampilan memiliki kaitan yang sangat erat, di mana akuntan dengan independensi dalam sikap mental yang baik dengan sendirinya akan bersikap tidak memihak menurut persepsi pemakai laporan keuangan.

Dalam tesisnya Kasidi (2007) menjelaskan bahwa independensi dalam penampilan akuntan publik dianggap rusak jika ia mengetahui atau patut mengetahui keadaan atau hubungan yang mungkin mengkompromikan independensinya. Ada empat jenis risiko yang dapat merusak independensi akuntan publik, yaitu :

1. *Self interest risk*, yang terjadi apabila akuntan publik menerima manfaat dari keterlibatan keuangan klien.
2. *Self review risk*, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyangkut keputusan yang dibuat untuk kepentingan klien atau melaksanakan jasa lain yang mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi pokok bahasan dalam penugasan pemberian jasa keyakinan.
3. *Advocacy risk*, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu erat kaitanya dengan kepentingan klien.
4. *Client influence risk*, yang terjadi apabila akuntan publik mempunyai hubungan erat yang kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramah-tamahan (*familiarity*) yang berlebihan dengan klien. Mempertahankan perilaku independen bagi auditor dalam memenuhi tanggungjawab mereka adalah sangat penting, namun yang lebih penting lagi adalah bahwa pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi itu sendiri. Berubahnya lingkungan audit telah menimbulkan kebutuhan akan perubahan yang cukup besar persyaratan independensi. Organisasi dan kisaran pelayanan yang ditawarkan oleh kantor akuntan publik juga telah bergeser dan kantor tersebut sering memasuki bisnis yang rumit dan hubungan keuangan dengan klien.

2.2.10. Etika

Etika, dalam bahasa latin "ethica", berarti falsafah moral. Etika merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama.

Maryani dan Ludigdo (2001) mendefinisikan etika sebagai seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi

Menurut Arens dkk, (2008) Etika didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral yang memiliki rangkaian nilai. Kebutuhan akan etika harus disadari oleh auditor sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat berarti pengorbanan diri. Prinsip-prinsip etika dikatakan sebagai kerangka dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa professional oleh anggota (Abdul, 2008).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) mendefinisikan etika sebagai (1) Kumpulan asas atau nilai berkenaan dengan akhlak, (2) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Auditor BPK dalam melaksanakan tugas pemeriksaan menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota BPK dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya. Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Keberadaan kode etik menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang harus ditaati oleh suatu profesi. Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggungjawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggungjawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap akuntan harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini.

Ikatan Akuntansi Indonesia pada Kongres VIII tahun 1998 memutuskan Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia, yang kemudian dijabarkan dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik IAI. Dalam kongres tersebut IAI menyatakan pengakuan tanggungjawab profesi kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip-prinsip ini memandu dalam pemenuhan tanggungjawab profesional dan sebagai landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini menuntut komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan mengorbankan keuntungan pribadi. Terdiri dari delapan prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip tanggungjawab profesi menyatakan bahwa sebagai profesional, anggota Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mempunyai peranan penting dalam masyarakat, terutama kepada semua pemakai jasa profesional mereka dan bertanggungjawab dalam mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggungjawab profesi dalam mengatur diri sendiri bersama-sama dengan sesama rekan anggota.

2. Prinsip kepentingan publik menyatakan bahwa setiap anggota berkewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
3. Prinsip integritas mengakui integritas sebagai kualitas yang dibutuhkan untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik.
4. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota untuk menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.
5. Prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk selalu menjaga dan memelihara kompetensi profesional serta ketekunan dalam melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan kemampuan.
6. Prinsip kerahasiaan mengharuskan anggota untuk menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan pekerjaan dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali ada kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.
7. Prinsip perilaku profesional menuntut anggota untuk berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang mendiskreditkan profesi.
8. Prinsip standar teknis mengharuskan anggota untuk menaati standar teknis dan standar profesional yang relevan dalam melaksanakan penugasan audit.

2.2.11. Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	D. Samuelson, 2006	<i>The determinants of perceived audit quality and auditee satisfaction in local government</i>	Kualitas audit dan kepuasan audit	kepuasan auditee berhubungan positif dengan keahlian auditor
2	Kitta, 2009	Pengaruh Kompetensi, dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit yang dimoderasi Orientasi Etika Auditor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan	sebagai variabel dependen, dan etika auditor sebagai variabel moderasi	Kompetensi dan independensi auditor berpengaruh meningkatkan kualitas audit, idealisme orientasi etika auditor tidak menguatkan atau melemahkan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit.
3	Alim (2007)	Pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas auditor sebagai etika editor sebagai variabel moderasi	Kompetensi dan independensi sebagai variabel independen. Kualitas auditor sebagai variabel dependen, dan etika auditor sebagai variabel moderasi	kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Sementara itu interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor
4	Novie (2013)	<i>An empirical analysis of auditor independence and audit fees on audit quality</i>	Variabel bebas (X) independensi auditor (X1) dan biaya audit (X2) Variabel terikat (Y) kualitas audit	independensi auditor secara signifikan mempengaruhi kualitas audit dan biaya audit secara signifikan mempengaruhi kualitas audit
5	Ayudewi dkk (2013)	Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Audit	Variabel bebas keahlian, Independensi, etika dan variabel terikat kualitas audit	bahwa keahlian, independensi, dan etika secara bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
6	Wiwit, (2014)	pengaruh keahlian, independensi, pengalaman audit dan etika terhadap kualitas auditor pada inspektorat provinsi kepulauan riau	Variabel bebas keahlian, independensi, pengalaman audit dan Etika dan variabel terikat kualitas audit	Keahlian, Independensi, Etika tidak berpengaruh terhadap Kualitas Auditor di Inspektorat Provinsi kepulauan Riau , dan variabel dari Pengalaman Audit berpengaruh terhadap Kualitas Auditor di inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
7	Meiyer dan Fuglister (1992)	How to improve audit quality perception of auditors and clients	Perseption of auditor of clients audit quality	Pengalaman dalam melakukan audit mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas audit
8	Indah (2010)	Pengaruh kompetensi dan independensi Auditor terhadap kualitas audit	Variabel bebas kompetensi dan independensi dan variabel terikat kualitas audit	bahwa pengalaman dalam melaksanakan audit, pengetahuan seorang auditor serta telaah dari rekan auditor (peer review) berpengaruh positif terhadap kualitas audit

No	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
9	Effendy (2010)	Pengaruh Kompetensi, Independensi, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit	Variabel bebas kompetensi dan motivasi dan variabel terikat kualitas audit	bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit
10	Ashari 2011	Pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap kualitas auditor pada inspektorat provinsi maluku utara	Variabel bebas keahlian, independensi, etika variabel terikat kualitas audit	keahlian, independensi dan etika secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor . Secara parsial keahlian dan independensi secara bersama berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor, namun tidak untuk etika tidak signifikan terhadap kualitas auditor.
11	Fransiska Kovinna	Pengaruh independensi, pengalaman kerja, kompetensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit	Variabel bebas independensi, pengalaman kerja, kompetensi, etika variabel terikat kualitas audit	etika auditor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan variabel lainnya seperti independensi, pengalaman kerja, dan kompetensi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit
12	Widagdo. (2002)	atribut – atribut kualitas auditor oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan klien	Variabel bebas atribut – atribut kualitas auditor variabel terikat kepuasan klien	Tanggung jawab profesi, Kepentingan publik, Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan kehati-hatian profesional, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, Standar Teknis.
13	Putu, (2014)	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit .	Variabel bebas akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme independensi dan variabel terikat kualitas audit.	akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit independensi dan pengalaman tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Kualitas audit secara simultan dipengaruhi oleh independensi, pengalaman, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme

2.3. Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan penelitian yang diuji kebenarannya (Sugiyono, 2012). Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian teori yang relevan ataupun hasil penelitian sebelumnya, maka dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut :

2.3.1. Pengaruh keahlian terhadap kualitas audit

Teori sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh Triandis (2007) dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan keahlian. Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan), dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Sikap dan perilaku seorang auditor yang mempunyai keahlian khusus seperti pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi teknis lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai auditor yang berkualitas. Audit yang berkualitas dipengaruhi oleh keahlian kompetensi auditor semakin luas keahlian seorang auditor maka akan memberikan keyakinan bahwa hasil audit yang lebih baik.

Keahlian adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas dan ditunjukkan dalam pengalaman auditnya. (Efendy, 2010).

Sedangkan menurut Lee dan Stone (1995), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Berbagai penelitian yang menguji hubungan antara keahlian dan kualitas audit yang saling Keahlian (kompetensi) tersebut terdiri dari dua dimensi, yaitu keterampilan dan pengetahuan.

Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Penerapan pengetahuan yang maksimal tentunya akan sejalan dengan semakin bertambahnya keterampilan yang dimiliki, sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang baik pula. Penelitian ini bertentangan Alim dkk (2007); Efendy (2010); Novi (2013) menyatakan bahwa keahlian (kompetensi) mempengaruhi kualitas suatu audit. Sebaliknya Fransiska (2014) menyatakan bahwa kompetensi tidak mempengaruhi kualitas suatu audit.

Peneliti mengembangkan hipotesis sebagai berikut bahwa:

H1: Keahlian berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

2.3.2. Pengaruh independensi terhadap kualitas audit

Teori sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh Triandis (2007) dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan independensi. Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan), dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Arens dan Loebbecke (1996) mendefinisikan “independensi sebagai berikut, auditing berarti berpegang pada pandangan yang tidak memihak di dalam penyelenggaraan pengujian audit, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit”. Sikap tidak memihak ini dapat dibentuk dalam dua sudut pandang yaitu : 1. Independensi dalam kenyataan (*Independence in fact*) yang berarti akuntan dapat menjaga sikap yang tidak memihak dalam melaksanakan pemeriksaan. 2. Independensi dalam penampilan (*Independence in appearance*) yang berarti akuntan bersikap tidak memihak menurut

persepsi pemakai laporan keuangan. Menurut Kasidi, (2007) Sikap menyangkut komponen kognitif berkaitan dengan keyakinan, sedangkan komponen sikap afektif memiliki konotasi suka atau tidak suka. Sikap dan perilaku auditor harus independen dalam situasi yang menyebabkan gangguan pribadi dan gangguan eksterns misalnya auditor memiliki hubungan yang dekat dengan auditan seperti hubungan sosial keluarga atau hubungan lainnya hal ini dapat merusak independensi seorang auditor dan dalam memberikan penilaian tidak obyektif hal tersebut dapat menyebabkan auditnya tidak berkualitas karena mempunyai kepentingan. Seorang auditor harus independen karena diharapkan dalam mengaudit tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat. Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang berguna dalam mengambil keputusan rasional dan berkualitas.

Kualitas audit tidak hanya dipengaruhi kompetensi yang dimiliki auditor saja, namun juga dipengaruhi oleh independensi auditor ketika melakukan audit. Menurut Meutia (2004) Ahson dan Asokan (2004) keputusan independensi adalah kemampuan auditor untuk melawan tekanan dan mempertahankan sikap yang tidak memihak ketika ia dihadapkan dengan tekanan pada pekerjaan. Berbagai penelitian yang menguji hubungan antara independensi dan kualitas audit yang saling bertentangan. Hasil penelitian oleh Alim dkk (2007); Novie (2013); dewi dkk (2010) Tetapi sebaliknya Samelson et al (2006); Efendy (2010); Wiwit (2014); Putu (2014;) menemukan bahwa independensi tidak mempengaruhi kualitas audit. Peneliti menyimpulkan bahwa H2 = Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

2.3.3. Pengaruh Etika terhadap kualitas audit

Teori sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh Triandis (2007) dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan keahlian, independensi, etika dan kualitas suatu audit. Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan), dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan.

Bersikap netral dan tidak memihak serta menghindari kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit serta wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit dengan adanya auditor yang independen dan etikanya/ moralnya baik diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat. Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja pemerintahan sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang berguna dalam mengambil keputusan rasional dan berkualitas.

Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan norma perilaku yang mengatur hubungan antara akuntan dengan klien, antara akuntan dengan sejawatnya, dan antara profesi dengan masyarakat. Keberadaan kode etik menyatakan secara eksplisit beberapa kriteria tingkah laku yang harus ditaati oleh suatu profesi. Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggungjawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggungjawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap akuntan harus

mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik ini.

Menurut Simamora (2006), seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil serta tindakan yang diambil itu harus mencerminkan kebenaran dan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Arens dkk, 2008 Etika secara garis besar didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral yang memiliki rangkaian nilai. Kebutuhan akan etika harus disadari oleh auditor sebagai bentuk tanggungjawab kepada masyarakat, klien, serta rekan praktisi, yang mencakup pula perilaku yang terpuji, walaupun hal tersebut dapat berarti pengorbanan diri. Setiap pertimbangan rasional ini mewakili kebutuhan akan suatu pertimbangan yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran dari keputusan etis yang telah dibuat, oleh karena itu untuk mengukur tingkat pemahaman auditor atas pelaksanaan etika yang berlaku dan setiap keputusan yang dilakukan memerlukan suatu ukuran. Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya memiliki pedoman-pedoman yang mengikat seperti kode etik dalam hal ini adalah BPK menetapkan UU Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik dan Peraturan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu pada standar audit, dan auditor wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit. Berbagai penelitian yang menguji hubungan antara etika dan kualitas audit yang saling bertentangan hasil dalam penelitian bahwa variabel etika berpengaruh signifikan

terhadap kualitas audit. Ayudewi (2013); Fransiska (2014) hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwit (2010) dan ashari (2011) Etika tidak berpengaruh terhadap Kualitas audit. Peneliti menyimpulkan bahwa:

H3: Etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

2.3.4 Pengaruh Keahlian, Independensi, Etika terhadap kualitas audit

Teori sikap dan perilaku yang dikembangkan oleh Triandis (2007) dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan keahlian, independensi, etika dan kualitas suatu audit. Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan untuk apa orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan), dan dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan.

Teori sikap dan perilaku dapat mempengaruhi auditor untuk bertindak, jujur, adil, mempunyai keahlian yang khusus, independensi dan etika yang baik dan tegas tanpa dipengaruhi tekanan maupun permintaan dari pihak tertentu atau kepentingan pribadi yang nantinya akan mempengaruhi auditor dalam mengambil judgment yang berkualitas. Keahlian, independensi, etika mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas audit ini berarti bahwa keahlian yang ditunjang pengetahuan yang dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit, sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik pada kualitas audit semakin auditor mampu menjaga independensinya dalam menjalankan penugasan profesionalnya, mematuhi prinsip-prinsip kode etik dan mematuhi aturan perilaku profesinya maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

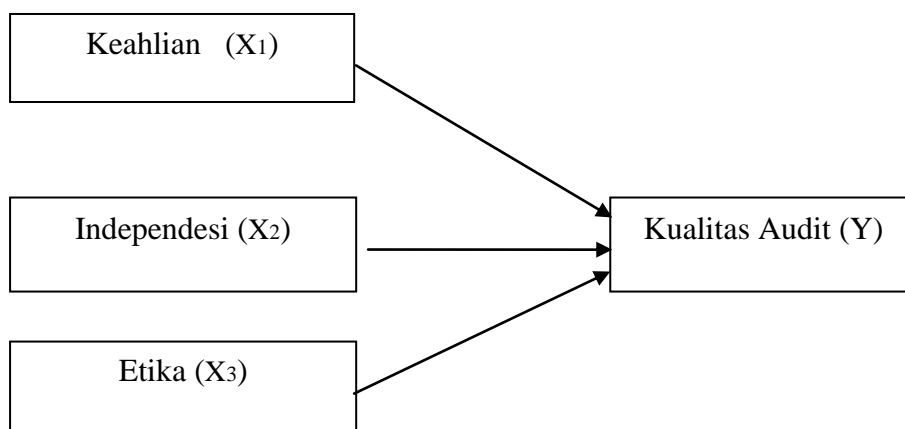
Menurut Simamora (2006), seorang auditor dalam membuat keputusan pasti menggunakan lebih dari satu pertimbangan rasional yang didasarkan pemahaman etika yang berlaku dan membuat suatu keputusan yang adil serta tindakan yang diambil itu harus mencerminkan kebenaran dan keadaan yang sebenarnya.

Berbagai penelitian yang menguji hubungan antara keahlian, Independensi, etika dan kualitas audit yang saling bertentangan Hasil dalam penelitian bahwa Keahlian, Independensi, Etika tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit (Wiwit, 2014) keahlian, independensi dan etika secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, Dewi (2010). Kompetensi dan independensi auditor berpengaruh meningkatkan kualitas audit, idealisme orientasi etika auditor tidak menguatkan atau melemahkan hubungan antara kompetensi dengan kualitas audit Kitta (2009). Peneliti menyimpulkan bahwa:

H4: Keahlian, Independensi, Etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tujuan di atas mengenai pengaruh keahlian, independensi, etika terhadap kualitas audit maka dapat di buat desain penelitian teori sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian penjelasan, karena penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dengan variabel dependen melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2009).

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sarana kuisioner. Metode survei adalah metode pengumpulan data primer yang diperoleh dari sumber aslinya (Indriantoro, 1999). Lokasi adalah penyebaran penyebaran adalah seluruh Pejabat Fungsional Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pejabat Fungsional Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2012). Sampel diambil dengan menggunakan Teknik penentuan sampel menggunakan

metode *purposive sampling*, Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan maksud penelitian yang berarti sebelum sampel diambil, ditentukan terlebih dahulu batasan-batasan sampel yang seperti apa yang akan diambil (Wiyono, 2011) dalam hal ini sampel yang diambil adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Kriteria responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pejabatan fungsional pemerintah memiliki tingkat pendidikan formal minimal Sarjana Muda atau Strata Satu (S1).
2. Pegawai yang sudah mengikuti pelatihan/bimbingan Jabatan fungsional dan bersertifikasi.
3. Wajib mengikuti pelatihan/bimbingan teknis dibidang seperti auditing, akuntansi sektor publik, dan keuangan daerah.
4. Memiliki Keahlian khusus yang dapat mendukung proses audit dan dapat berkomunikasi dengan baik.

Persyaratan ini digunakan agar kualitas audit bisa digunakan untuk mengambil keputusan yang objektif. Sampel sebanyak 60 orang Pejabat Fungsional Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui penelitian dan melalui penggunaan kuesioner (Sugiyono, 2012).

Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dari penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode survei, dengan menggunakan kuesioner yang merupakan daftar pertanyaan struktur yang ditunjukkan kepada pejabat auditor. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Riduwan, 2010).

Pengiriman kuesioner dilakukan secara langsung yaitu peneliti melakukan pengambilan data dengan mendatangi secara langsung ke kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung pengisian kuisoner diberi jangka waktu untuk mengisi dan mengembalikan kuesioner. Jangka waktu pengembalian kuesioner masing-masing adalah 1 bulan sejak kuesioner diterima oleh responden, Kuesioner yang digunakan replikasi dari Efendy (2010) dan Dewi (2011).

3.4. Definisi Operasional

Penelitian menggunakan variabel adalah sebagai berikut:

a. Variabel Bebas

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen (Sugiyono, 2012). Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah keahlian (X1), Independensi (X2), dan etika (X3).

b. Variabel Terikat

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas audit (Y).

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu Keahlian (X1), Independensi (X2), dan Etika (X3) yang merupakan faktor- faktor dari kualitas audit pada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung dan satu variabel dependen yaitu Kualitas Auditor (Y). Keahlian dalam penelitian ini adalah Auditor memiliki tingkat pendidikan teknis seperti dibidang auditing, akuntansi sektor publik, dan keuangan daerah, memiliki Keahlian khusus yang dapat mendukung proses audit, mempunyai sertifikasi jabatan fungsional dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan dn mampu berkomunikasi dengan baik.

Pengukuran variabel ini menggunakan skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

(Riduwan, 2010) skala linkert memiliki 5 alternatif pilihan, yaitu: STS: Sangat Tidak Setuju, TS: Tidak Setuju, RR: Ragu-ragu, S: Setuju, SS: Sangat Setuju. Nilai masing masing setiap jawaban diberi nilai berdasarkan skala linkert adalah sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju	(STS)	=	1
Tidak Setuju	(TS)	=	2
Ragu-ragu	(RR)	=	3
Setuju	(S)	=	4
Sangat Setuju	(SS)	=	5

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Variabel Dependen Kualitas Audit (Y)	Kualitas Audit (Y) Adalah kualitas audit dalam keakuratan temuan audit, nilai rekomendasi, kejelasan laporan, manfaat audit dan tindak lanjut audit	Kualitas` audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas proses 2. Apakah audit dilakukan dengan cermat 3. Sesuai prosedur 4. Tindak lanjut audit 	Interval
Variabel Independen Keahlian (X ₁)	Auditor harus mempunyai pengetahuan, ketrampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya	Pengetahuan keterampilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pendidikan 2. Memiliki kompetensi teknis 3. Memiliki sertifikasi JFA dan mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan 	Interval
Independensi (X ₂)	Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya	Independensi dalam program audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki objektivitas 2. Memiliki kejujuran 	Interval
Etika (X ₃)	Auditor harus mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Pelaksanaan audit harus mengacu kepada Standar Audit dan wajib mematuhi kode etik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari standar audit.	Keperdulian pada kode etik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor harus mematuhi kode etik 2. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit 	Interval

3.5. Model dan Teknik Analisis Data

3.5.1. Model Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda (*Multiple Regression Analysis*). Menurut Sugiyono (2012)

analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear

berganda adalah : $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$

Keterangan :
Y = Kualitas Audit
X 1 = Keahlian
X 2 = Independensi
X 3 = Etika
 α = Konstanta
 β = Koefisien Regresi
e = Error

3.5.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan model regresi. Penelitian diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari uji kualitas data, pengujian asumsi klasik, statistik deskriptif dan uji statistik untuk pengujian hipotesis.

3.5.3. Uji Kualitas Data

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) ada dua konsep mengukur kualitas data yaitu uji reliabilitas dan validitas. Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen.

3.5.3.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan koefisien korelasi *Pearson correlation*. Data dikatakan valid apabila korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksinya signifikan pada level 0,05 atau 0,01 maka pertanyaan tersebut valid (Ghozali, 2013).

3.5.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dengan uji statistic *Cronbach's alpha* (α) yaitu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2013).

3.5.4. Uji Asumsi Klasik

Untuk dapat melakukan analisis regresi berganda perlu pengujian asumsi klasik sebagai persyaratan dalam analisis agar datanya dapat bermakna dan bermanfaat. Menurut Ghozali (2013) dalam membuat uji asumsi klasik harus menggunakan data yang akan digunakan dalam uji regresi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Adapun uji asumsi klasik yang dipakai yaitu uji Multikolinearitas, uji Normalitas, uji Heteroskedastisitas, sedangkan uji Autokorelasi tidak digunakan karena data penelitian merupakan data primer dalam bentuk kuesioner dan tidak berhubungan dengan model data yang memakai rentang waktu.

3.5.4.1 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Independen). (Ghozali, 2013). Dengan menghitung nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Semua pengujian tersebut memanfaatkan fasilitas *SPSS Versi 18*. Persamaan regresi baru dapat digunakan jika tidak terjadi linear dari masing-masing variabel bebas. Suatu regresi dikatakan terdeteksi multikolinearitas apabila nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) menjauhi 1 atau angka *tolerance* menjauhi 1 pada *Output coefficient*. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai (VIF) diatas 10, maka dikatakan terjadi multikolinieritas dan sebaliknya apabila nilai $VIF < 10$ maka dikatakan tidak terjadi multikolinearitas.

3.5.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homokedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. (Ghozali, 13). Untuk memenuhi asumsi heteroskedastisitas, maka perlu diuji apakah ada gejala heteroskedastisitas atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian akan dilakukan dengan dilihat melalui pola diagram pencar (*scatterplot*). Jika *scatterplot* membentuk pola tertentu yang jelas maka regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas, sebaliknya jika *scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebar) maka regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

3.5.4.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Untuk menguji Model regresi memiliki distribusi normal atau tidak dapat dilihat menggunakan probability plot menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal sehingga data dikatakan berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas yang dibutuhkan dalam persamaan regresi. Untuk menguji normalitas data yaitu dengan *SPSS Versi 18*.

3.5.5 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik. Statistik deskriptif umumnya digunakan peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang paling utama dan data demografi responden. (Ghazali, 2013).

3.5.6 Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melihat rata-rata nilai variabel yang dipakai. Kuesioner diarahkan untuk jawaban positif atau negatif. Interval jawaban terdiri dari 1 sampai dengan 5, dan jawaban point 4 dan point 5 merupakan jawaban positif karena jawaban point 4 adalah setuju dan point 5 adalah sangat setuju. Untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh keahlian, independensi, dan etika terhadap kualitas digunakan pengujian hipotesis dengan uji R^2 uji F dan uji t.

3.5.6.1 Uji Keofisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika nilai R^2 mendekati satu maka variabel – variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai *adjusted* R^2 untuk menilai model regresi, nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah dalam model. Semakin besar nilai *adjusted* R^2 , semakin besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2013).

3.5.6.2 Uji F (F-test)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2013). Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta = 0$, Keahlian, Independensi dan Etika tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

$H_a : \beta \neq 0$, Keahlian, Independensi dan Etika berpengaruh terhadap kualitas audit.

Pada tabel ANOVA didapat uji F yang menguji semua sub variabel bebas yang akan mempengaruhi persamaan regresi. Dengan menggunakan derajat keyakinan 95% atau taraf nyata 5% serta derajat kebebasan df_1 dan df_2 untuk mencari nilai F tabel. Nilai F tabel dapat dilihat dengan menggunakan F tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan :

- a. Jika probabilitas $>$ tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak
- b. Jika probabilitas $<$ tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_0 diterima

3.5.6.3. Uji Parsial (t test)

Uji parsial (t test) digunakan untuk mempengaruhi pengaruh masing-masing variabel independenterhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah sebagai berikut: $H_0:\beta=0$, Keahlian, Independensi dan Etika tidak berpengaruh terhadap

kualitas auditor. $H_a:\beta \neq 0$, Keahlian, Independensi dan Etika berpengaruh terhadap

kualitas auditor. Untuk mencari t tabel dengan $df = N-2$, taraf nyata 5% dapat dengan menggunakan tabel statistik. Nilai t tabel dapat dilihat dengan menggunakan t tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika t hitung $>$ t tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak
- b. Jika t hitung $<$ t tabel, maka H_a ditolak dan H_0 diterima

Keputusan statistik hitung dan statistik tabel dapat juga diambil keputusan berdasarkan probabilitas, dengan dasar pengambilan keputusan:

- a. Jika probabilitas $>$ tingkat signifikan, maka H_a diterima dan H_0 ditolak
- b. Jika probabilitas $<$ tingkat signifikan, maka H_a ditolak dan H_0 diterima

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keahlian, independensi, etika terhadap kualitas audit. Berdasarkan pengujian dan pembahasan maka dapat disimpulkan dan diringkas sebagai berikut:

1. Keahlian berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit artinya bahwa keahlian yang tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas audit akan tinggi, demikian sebaliknya bila keahlian rendah/buruk maka kualitas audit akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa keahlian mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas audit ini berarti bahwa semakin ahli seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.
2. Independensi pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. artinya bahwa independensi yang tinggi akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang baik, demikian sebaliknya bila independensi rendah/buruk maka kualitas audit akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa independensi mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas audit ini berarti bahwa semakin auditor mampu menjaga independensinya dalam menjalankan penugasan profesionalnya maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik.

3. Etika pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit artinya bahwa bila etika nya baik maka kualitas audit akan baik, demikian sebaliknya bila etika rendah/buruk maka kualitas audit akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa etika mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas audit ini berarti bahwa auditor pemerintah dalam melakukan tugasnya telah mematuhi prinsip-prinsip perilaku dan mematuhi aturan perilaku profesinya.
4. Keahlian, independensi, etika berpengaruh signifikan dan simultan terhadap kualitas audit bahwa bila keahlian, independensi, etika nya baik maka kualitas audit akan baik, demikian sebaliknya bila keahlian, independensi etika rendah/buruk maka kualitas audit akan rendah/buruk. Pengaruh signifikan menunjukkan bahwa keahlian, independensi, etika mempunyai peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas audit ini berarti bahwa keahlian yang ditunjang pengetahuan yang dimiliki auditor merupakan dasar yang dibutuhkan seorang auditor dalam proses audit, sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik pada kualitas audit semakin auditor mampu menjaga independensinya dalam menjalankan penugasan profesionalnya, mematuhi prinsip-prinsip kode etik dan mematuhi aturan perilaku profesinya maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik .

5.2. Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah keahlian, independensi dan etika untuk meningkatkan kualitas audit dari auditor pemerintah yang bekerja di BPK Perwakilan Propinsi Lampung sudah baik sehingga mampu memberikan jasa pelayanan baik yang diharapkan masyarakat tetapi dalam rangka meningkatkan kualitas audit yang lebih baik lagi, maka diperlukan adanya peningkatan keahlian yaitu pengetahuan, independensi dan etika dengan menjunjung tinggi prinsip kode etik profesi dalam setiap penugasan audit yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan hasil audit yang lebih baik lagi.

5.3. Keterbatasan

Keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini dan mungkin berdampak pada hasil penelitian diantaranya yaitu :

1. Respondennya terlalu sedikit hanya dilakukan di Badan Pengawasan Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung.
2. Penelitian sulit mendapatkan jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan kuisioner yang diberikan, karena kuisioner yang diberikan tidak dapat dikembalikan sebagaimana yang diharapkan penulis.
3. Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan kuesioner, sehingga masih ada kemungkinan kelemahan-kelemahan yang ditemui, seperti jawaban yang tidak cermat, tidak serius, responden yang menjawab asal-asalan dan tidak jujur, serta pertanyaan yang kurang lengkap atau kurang dipahami oleh responden.
4. Membagikan kuisioner dan menarik data kuesioner lewat perantara

5.4. Saran

Untuk penelitian yang sama untuk akan datang kami sarankan agar:

1. Melengkapi metoda survei dengan wawancara untuk meningkatkan sikap dan kepedulian dan keseriusan responden dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada dan mengurangi subjektivitas dari responden yang bisa mengakibatkan hasil penelitian ini rentan dengan jawaban responden.
2. Peneliti diharapkan bisa bertemu langsung dengan responden dan mengadakan wawancara langsung terhadap responden agar data yang diperoleh sesuai dengan data yang sebenarnya.
3. Peneliti hanya menggunakan variabel keahlian, independensi, etika sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sedangkan masih banyak lagi faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit seperti objektivitas, integritas, pengalaman, akuntabilitas, profesionalisme dan lain-lain yang belum dimasukkan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah,. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat
- Albana 2010. Attribution Theory (*Harold*) *Kelley*, 1972-1973) From:[http://albana 19 blgpost.com/2010/01/attribution-theory-harold-kelly1972.htm](http://albana19blgpost.com/2010/01/attribution-theory-harold-kelly1972.htm) (diakses 27 Januari 2014)
- Alia, Ariesanti. 2001, *Presepsi Auditor Terhadap Kualitas Audit*, Universitas Gadjah Mada. Tesis. Tidak untuk dipublikasikan.
- Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti. 2007. Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*.
- Arens, A. A. and J. K. Loebbecke. 1996. *Auditing: Suatu Pendekatan Terpadu. Terjemahan oleh Amir Abadi Jusuf. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat.*
- Arens, Alvin A., and J.K. Loebecke, 2008, *Auditing : Pendekatan Terpadu, Adaptasi oleh Amir Abadi Yusuf, Buku Satu Salemba Empat, Jakarta.*
- Arens, Hebert 2005 *Auditing II : Modul oleh Pusdiklatwas BPKP Edisi ke Empat Jakarta*
- Ashari, Ruslan. 2011. *Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Skripsi*
- Ashon, Umar dan Anandarajan Asokan. 2004. Auditor's Independence of Judgment Under Pressure. *Internal Auditing*. April. p. 22.
- Ayu Dewi Riharna Najib Arifuddin Asri Usman Ayudewi.riharna. *Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel)*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007. Peraturan BPK-RI No. 1 tentang *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)*.
- Cooper, D.R., & Schindler, PS.2006. *Business Research Methods (9 ed): New York, NY: Irwin/McGraw-Hill*

- De Angelo, L.E. 1981. *Auditor Independence, "Low Balling", and Disclosure Regulation. Journal of Accounting and Economics* 3. Agustus. p. 113-127.
- Deis, D.R. dan G.A. Groux. 1992. *Determinants of Audit Quality in The Public Sector. The Accounting Review*. Juli. p. 462-479.
- Effendi, Muh. Taufiq. 2010. Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Motivasi terhadap Kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). *Tesis (tidak dipublikasikan)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Elim, John. 2006. Implementasi Risk Based in Audit. Diklat Teknis Substansi Bawasda, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Jakarta.
- Falah, S. 2005. Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Orientasi Etika terhadap Sensitivitas Etika. Universitas Diponegoro Semarang.
- Fitriany, 2010. Analisis Komprehensif Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit. Disertasi Pascasarjana Ilmu Akuntansi Universitas Indonesia, Tidak Dipublikasikan
- Fransiska Kovinna. 2014. Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit (studi kasus pada kantor Akuntan Publik di kota Palembang)
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gondodiyoto, Sanyoto, 2007, *Audit Sistem Infomasi*, Edisi Revisi, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2003. *Auditing 1 (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Revisi. Jakarta, Salemba Empat..
- Halim, Abdul. 2008. *Auditing*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Harahap, Sofyan Syafri. 1991, *Auditing Kontemporer*, Penerbit Erlangga, Surabaya.
- Haslinda Lubis, 2009, Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan profesional dan Kecermatan Kode Etik (studi kasus pada Inspektorat Sumatra Utara)
- Hendry Simamora, *Auditing* Jilid 2 Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002
- Indra Bastian. 2007. *Audit Sektor Publik*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta
- Indah, S.N.M. 2010. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit. Penelitian FE Universitas Diponegoro. Semarang.

- I Putu Hatesa Twenta Zoja. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit . Penelitian FE Universitas Diponegoro. Semarang
- Kansil CST, Kansil Cristine, S.T. Pokok-pokok etika profesi hukum bagi mahasiswa dan subyek hukum etika profesi hukum hakim, penasihat hukum, notaris, jaksa, polisi C.S.T. Kansil; Christine S.T. Kansil, jakarta Pradnya Paramita, 2003
- Kasidi. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor. Tesis. Semarang: Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi, Universitas Diponegoro.
- Keith and Christine Jubb.2003.Market Competition and Auditor Independence. Agenda, Volume 10, Number 3, 2003, pages 213-228.
- Khikmah, Siti Noor. 2005. "Pengaruh Profesionalisme Terhadap Keinginan Berpindah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Auditor Se-Jawa)". Thesis Program Pasca Sarjana (Tidak Dipublikasikan). Universitas Diponegoro
- Kitta, Syfaruddin. 2009. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit yang dimoderasi Orientasi Etika Auditor (Studi pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan). *Tesis. Tidak untuk dipublikasikan.*
- Kreitner dan Kinicki. 2005. *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Salemba empat
- Kusharyanti. 2003. "*Temuan penelitian mengenai kualitas audit dan kemungkinan topik penelitian di masa datang*". Jurnal Akuntansi dan Manajemen (Desember).
- Kuswadi. 2005. *Cara Mengukur Kepuasan Karyawan*. Cetakan Kedua, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Kharismatuti, Norma 2012, Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi, SKRIPSI Universitas Diponegoro, Semarang.
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. Diterjemahkan oleh Vivin Andika Yuwono dkk. Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2006. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintah Vol.2,No. 1
- Maryani, T., & Ludigdo, U. (2001). Survey atas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap dan Perilaku Etis Akuntan. Jurnal TEMA 2 (1): 49-62.

- Mayangsari, Sekar. 2003. *Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Pendapat Audit: Sebuah kuasieksperimen*. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol.6 No.1 (Januari)
- Messier, F.W., V.S. Glover, dan F.D. Prawitt. 2005. *Jasa Audit dan Assurance: Suatu Pendekatan Sistematis*. Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan. Edisi 4 Buku 1 & 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Meutia, Intan. 2004. "Independensi auditor terhadap Manajemen Laba Untuk Kap Big 5 dan non Big 5". Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol. 2 No. 1 (Januari). Pp 37-52
- Miftah Thoah. (2007). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Model keahlian administrasi diusulkan oleh Robert Katz di *Harvard Business Review*, berjudul "*Skills of an Effective Administrator*" dari tahun 1955, ia mengidentifikasi 3 jenis keahlian yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah keahlian teknis, manusia, dan konseptual.
- Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ. Pain Management. In : Morgan GE, editor. *Clinical Anesthesiology*, 4thed. Lange Medical Books/McGraw-Hill.2006;359-412.
- Mulyadi. 1992. *Pemeriksaan Akuntan*. Yogyakarta: Badan Penerbit STIE YKPN
- Notoatmodjo, S. *Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. Jakarta.
- Rai, I Gusti, Agung. 2008. *Audit Kinerja pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Robbins, Stephen P. 2003. *Perilaku Organisasi* Diterjemahkan oleh Tim Indeks. Penerbit Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Ruslan Ashari. 2011 *Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika terhadap Kualitas Auditor pada inspektorat provinsi maluku utara*. Penelitian FE Universitas Diponegoro. Semarang.
- Samelson, D., Lowenshon, S., and Johnson, L. 2006. *The Determinants of Perceived Audit Quality and Auditee Satisfaction in Local Government*. *Journal of Public Budgeting, Accounting, & Financial Management*, Vol. 18, No. 2
- Sarwono, S. W. *Psikologi remaja*. Edisi revisi 8. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2004.
- Sihwahjoeni dan Gudono, 2000, *Persepsi Akuntan Terhadap Kode Etik Akuntan*, Jurnal Riset Akuntan Indonesia, Juli, pp. 168-184.
- Soegiastuti, Janti. 2005. *Persepsi Masyarakat Terhadap Independensi Auditor Dalam Penampilan (Studi Empiris Pada Analisis Kredit BKK Jawa Tengah)*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi UNDIP

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Sunarsip, 2001, *Coorporat Governance Audit : Paradigma Baru Profesi Akuntansi dalam Mewujudkan Good Coorporate Gvernance, Media Akuntansi*, No. 17/Th. VII.pp. II-VII
- Sri Lastanti, Hexana. 2005. *Tinjauan terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Atas Skandal Keuangan*. Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi Vol. 5 No. 1 April 2005. Hal 85-97.
- Triandish HC.Anizude And annudechange. New York:Wiley,1971.232p.(Departmento of Psychology, University Of Illinois, Champaign, IL)
- UU Nomor 5 Tahun 2004 (Singih dan Bawono, 2010).
- Widagdo, R.S Lesmana, S.A Irwandi. 2002. Analisis Pengaruh Atribut- Atribut Kualitas Audit terhadap Kepuasan Klien (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta). SNA 5 Semarang p. 560-574.
- Wiwit Syafitri, Pengaruh Keahlian, Independensi, Pengalaman Audit dan Etika terhadap Kualitas auditor pada inspektorat Provinsi Kepulauan Riau